

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA KPN SERUMPUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Yunus Dwi Kasmanto

yunus@gmail.com

Politeknik Raflesia

Abstract - *Financial statements are a means of communicating financial information from the results of the accounting activity process that can assist users of financial statements in making decisions. Generally accepted Financial Accounting Standards are considered complicated to apply to business entities that do not have public accountability. Based on this, IAI issued Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP) which can accommodate accounting needs for entities that do not have public accountability. This study aims to analyze the application of SAK-ETAP in the presentation of the financial statements of the Cognate KPN of the Education and Culture Office of Rejang Lebong Regency. KPN Cognate of the Education and Culture Office of Rejang Lebong Regency is a business entity that manages members' funds in the form of savings and loans. The method used in this research is comparative descriptive analysis. The results of the study based on the presentation of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity, and cash flow statements for 2019, show that the KPN Cognate of the Education and Culture Office of Rejang Lebong Regency has not presented notes on financial statements (CALK), there is an error in the classification of account posts, and there are inconsistencies in updating the statement of cash flows. This study suggests that cooperatives disclose cooperative accounting policies in CALK, update each component of financial statements, and hire employees who are skilled in accounting.*

Kata kunci: *Financial statements, SAK ETAP*

1. PENDAHULUAN

Koperasi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Koperasi sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran koperasi yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat koperasi dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar, karena Koperasi dan UKM dianggap mampu beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Koperasi merupakan salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi dalam menjalankan usahanya sangat berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan badan usahanya sendiri. Koperasi tidak hanya sebagai bentuk badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi memerlukan pencatatan akuntansi dalam menunjang usahanya. IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk diterapkan oleh entitas-entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK-ETAP. Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud, yaitu manajemen. Sedangkan pihak eksternal, yaitu pemegang saham atau investor, kreditor, karyawan, dan pemerintah. SAK-ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam golongan entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dalam menyajikan laporan keuangannya perlu menerapkan SAK-ETAP.

International Cooperative Alliance (ICA) yang dikutip oleh Hendar, (2010:18) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, dan usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Ropcke (2012:14) mengartikan koperasi sebagai suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Kusuma dan Budianto (2013) menyatakan bahwa pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif, dan mandiri, koperasi diharapkan mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian nasional.

Menurut Pangerapan (2013) akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi ekonomi yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen. Duska *et al* (2011:10) menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu teknik dan praktiknya merupakan seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk membantu orang dalam memonitori transaksi ekonominya.

Akuntansi memberikan gambaran keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi suatu organisasi atau orang. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mencakup proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi serta mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk pengguna laporan keuangan yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Fahmi (2012: 21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kieso (2011:5) mendefinisikan laporan keuangan sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan.

Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. IAI (2009:2) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan menurut SAK-ETAP meliputi: (a) Neraca; (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; (d) Laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Wuwungan (2013) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP disahkan

oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK-ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir. Entitas yang diizinkan untuk menggunakan SAK-ETAP adalah entitas yang: (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit, karyawan, dan pemerintah.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: (1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi untuk mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

SAK-ETAP paragraf 2.24 menyatakan bahwa pengukuran unsur laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas; dan (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Lebih lanjut lagi SAK-ETAP menjelaskan pada paragraf 2.34-2.37 mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset.

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

2. Kewajiban.

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Penghasilan.

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

SAK-ETAP paragraf 2.30 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. SAK ETAP menambahkan pada paragraf 2.31 bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

SAK-ETAP paragraf 3.2 menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK-ETAP dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK-ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan, dan kinerja keuangan entitas. Lebih lanjut lagi pada paragraf 3.9 SAK-ETAP menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK-ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif dimana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi serta membandingkan penyajian laporan keuangan KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan SAK-ETAP yang berlaku.

Objek dalam penelitian ini adalah KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan Juni 2021 yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) Peneliti melakukan observasi dan studi literatur untuk menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian serta menemukan metode yang akan digunakan dalam penelitian; (2) Melakukan permohonan izin penelitian pada objek penelitian; (3) Mengetahui struktur organisasi objek penelitian, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing; (4) Mengetahui bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan; (5) Menelusuri proses penyajian laporan keuangan yang ada di objek penelitian; (6) Membandingkan hasil yang diperoleh dari koperasi dengan SAK-ETAP untuk dijadikan acuan dasar dalam menganalisa permasalahan yang ada; dan (7) Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.

2.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas: (1) Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka-angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan observasi; dan (2) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau bilangan (numeric). Data kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan diantaranya Neraca, Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat didokumentasikan dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil koperasi dan laporan posisi keuangan/neraca koperasi. Peneliti memperoleh data berupa profil koperasi dan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas tahun 2020; dan
2. Interview/wawancara, metode ini dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti mewawancarai Pengurus dan Karyawan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai jenis usaha dan penyajian laporan keuangan KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

2.4 Metode Analisis

1. Deskriptif, metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi; dan
2. Komparatif, metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan praktik yang terjadi pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Neraca KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK-ETAP mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu pada neraca.

Tabel 1. Checklist Pos-pos Neraca pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong

No	Pos-pos pada Neraca	Ada/Tidak
1	Kas dan Setara Kas	Ada
2	Piutang Usaha dan Piutang Lainnya	Ada
3	Persediaan	Ada
4	Properti Investasi	Tidak Ada
5	Aset Tetap	Ada
6	Aset Tidak Berwujud	Tidak Ada
7	Utang Usaha dan Utang Lainnya	Ada
8	Aset dan Kewajiban Pajak	Tidak Ada
9	Kewajiban diestimasi	Tidak Ada
10	Kas dan Setara Kas	Ada

KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong mencantumkan 3 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK-ETAP.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan SAK-ETAP pada KPN Serumpun dimuat dalam tabel 3.

Tabel 3. Checklist Informasi Laporan Perubahan Ekuitas pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong

No	Informasi Laporan Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1	Laba atau rugi untuk periode	Ada
2	Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas	Ada
3	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui	Tidak Ada
4	Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode	Ada

Tabel 4. Ilustrasi Pos Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

1	Kenaikan/Penurunan Hutang Pihak Ketiga	Rp. xxxxxx
2	Kenaikan/Penurunan Hutang Bank	Rp. xxxxxx
3	Kenaikan/Penurunan Kewajiban Lain	Rp. xxxxxx
4	Kenaikan/Penurunan Simpanan Pokok	Rp. xxxxxx
5	Kenaikan/Penurunan Simpanan Wajib	Rp. xxxxxx
6	Kenaikan/Penurunan Cadangan Koperasi	Rp. xxxxxx
7	(Pembagian Sisa Hasil Usaha)	Rp. xxxxxx
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. xxxxxx

Entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan penuh pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak memiliki CALK sehingga koperasi belum secara penuh menerapkan SAK-ETAP sebagai panduan dalam menyajikan laporan keuangannya. Suatu laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK-ETAP harus memiliki CALK sedangkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan CALK dalam laporan keuangannya. CALK pada dasarnya berfungsi untuk memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam penyajian neraca KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan kewajiban pajak. KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong menyajikan beban berdasarkan fungsi beban, namun fungsi beban yang dimiliki koperasi ini hanya satu fungsi beban yaitu beban operasional. Hal ini

menyebabkan koperasi melakukan beberapa kesalahan dalam mengklasifikasikan beban menurut fungsinya karena tidak semua beban memiliki fungsi yang sama. SAK-ETAP menyatakan bahwa beban pajak harus diklasifikasikan kedalam pos sendiri, hal ini tidak dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Penyajian laporan perubahan ekuitas yang dilakukan oleh koperasi pada dasarnya sudah sesuai dengan format laporan perubahan ekuitas yang dikeluarkan oleh SAK-ETAP. Penyajian laporan arus kas aktivitas operasi dan investasi KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan SAK-ETAP, namun untuk aktivitas pendanaan KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong masih melakukan beberapa kesalahan. Dalam penyajian laporan arus kas aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong terdapat beberapa akun yang seharusnya tidak disertakan dalam aktivitas pendanaan. SAK-ETAP paragraf 7.2 menjelaskan bahwa cerukan bank pada umumnya termasuk dalam aktivitas pendanaan jika dimaksudkan untuk hal pendanaan, namun SAK-ETAP juga menambahkan bahwa jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas yang digunakan sebagai aktivitas operasi. Kewajiban tersebut tidak bisa dimasukkan dalam arus kas aktivitas pendanaan tetapi diakui sebagai aktivitas operasi. Koperasi sendiri menyatakan bahwa pinjaman yang didapatkan dari bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan digunakan untuk aktivitas operasi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi kurang tepat dalam mengklasifikasikan pos-pos pada aktivitas pendanaan karena seharusnya utang bank harus dimasukkan kedalam aktivitas operasi. Sedangkan utang pihak ketiga didefinisikan sebagai hutang usaha oleh koperasi. Utang usaha berdasarkan SAK-ETAP termasuk dalam aktivitas operasi. Selain itu laporan arus kas terakhir yang disajikan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tercatat pada periode 2020, sehingga bisa dilihat bahwa koperasi tidak memperbarui laporan keuangannya.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis dari KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK-ETAP. Adapun hal-hal yang membuat koperasi ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK-ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK-ETAP itu sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan.

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Koperasi Karyawan dan Pengurus KPN Serumpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong: (a) Koperasi secara umum belum mengungkapkan secara penuh kebijakan akuntansi signifikan pada catatan atas laporan keuangan, maka sebaiknya dibuat catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan sebagai acuan bagi pihak eksternal yang berkepentingan dalam memahami laporan keuangan perusahaan; (b) Koperasi sebaiknya

- memperbarui laporan keuangannya; dan (c) Manajemen sebaiknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya laporan keuangan.
2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): Sebaiknya Memberikan sosialisasi terbuka mengenai penyusunan laporan keuangan dalam kaidah SAK-ETAP bagi perusahaan yang tergolong UMKM di setiap kota yang ada di Indonesia.
 3. Bagi Politeknik Raflesia Rejang Labong: Sebaiknya dapat ikut melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan SAK-ETAP bagi perusahaan kecil dan tenaga kerja didalamnya, sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ariantini, Ni Luh Gede. 2014. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri.

Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, <http://ejournal.undiksha.ac.id/> diakses 8 Februari 2015. Vol.4, No.1.

Duska, R., Duska, B.R., Ragatz, J.A. 2011, *Accounting Ethics*, 2nded, Singapore, Wiley-Blackwell. Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung.

Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.

Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kusuma, H. & Budianto, H. 2013, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi, *Jurnal Cahaya Aktiva Politeknik Cahaya Surya Kediri*, http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal/content.php?module=jurnal_poltek diakses 8 Februari 2015. Vol. 3, No. 2. Hal.81-91.

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Jakarta.